

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango)

OLEH

**HARDIYANI ARAFAH
E.11.18.054**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN**

OLEH

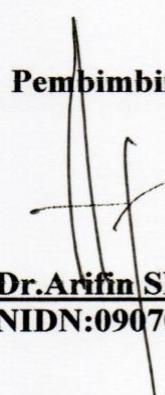
**HARDIYANI ARAFAH
E.11.18.054**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

MENYETUJUI

Pembimbing I


Dr. Arifin SE, M.Si
NIDN: 0907077401

Pembimbing II


Rusdi Abdul Karim SE, MAk
NIDN : 0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:

HARDIYANI ARAFAH

E11.18.054

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri.,SE.,MM
(Ketua Penguji)
2. Melinda Ibrahim, SE.,MSA
(Anggota Penguji)
3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Dr. Arifin SE.,M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli yang diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) di Universitas Ichsan Gorontalo
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pihak pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicatatumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 7 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hardiyani Arafah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penelongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 153)

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah: 6)

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (Keperluan) nya” (Q.S Ath-Tholaq)

“ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan hati, agar kamu bersyukur” (Q.S An Nahl 16:78)

- *Semua impian dapat menjadi kenyataan ketika kita memiliki tekad dan keberanian yang kuat untuk mewujudkannya*
- *Tetap jadi diri sendiri, mencari jadi diri, dan belajar hidup mandiri selalu optimis, Karena hidup terus mengalir dan roda kehidupan terus berputar, jangan lupa kepada sang pencipta terus Berdoa, Bersyukur, Senyum dan Bahagia*

PERSEMBAHAN:

- *Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu (Marlinda Daud) dan Ayah (Arafah Paibing) yang telah memberikan kasih saying, secara dukungan, ridho yang tidak mungkin dapat terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk ibu dan ayah bahagia, arena kusadari selama ini belum bisa berbuat lebih. Sehat selalu untuk ibu dan ayah yang selalu menasehati, meridhoiku serta selalu mendoakanku dalam melakukan yang lebih baik.*

***ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU***

ABSTRACT

HARDIYANI ARAFAH. E1118054. THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE FINANCIAL REPORT QUALITY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF BONE BOLANGO REGENCY

This research aims to determine and analyze to what extent the effect of the Regional Financial Accounting System (X), consisting of Recording System (X1), Summary System (X2), and Reporting System (X3) simultaneously and partially on the Financial Report Quality at the Regional Revenue Agency of Bone Bolango Regency. This study employs a type of quantitative research using the survey method. Survey research is research that takes a sample from one population and employs a questionnaire as the primary data collection tool. It uses Path Analysis as a data analysis method. The results of hypothesis testing show that the Regional Financial Accounting System (X) simultaneously has a positive and significant effect on the Financial Report Quality (Y) by 0.562 (56.20%). There is a value of 0.438 (43.80%) affected by external variables unexamined. Partially, the Recording System (X1) has a 0.203 (20.30%), the Summary System (X2) has a 0.178 (17.80%), and the Reporting System (X3) has a 0.181 (18.10%) effect on the Financial Report Quality (Y).

Keywords: *regional financial accounting system, financial report quality*

ABSTRAK

HARDIYANI ARAFAH. E1118054. PENGARUH SISTEN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X), yang meliputi Sistem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), Sistem Pelaporan (X3), secara simultan dan *parsial* berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian Kuantitatif, dengan menggunakan metode Survei. Adapun penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok dan menggunakan *Path Analysis* sebagai metode analisis data. Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) secara *Simultan* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sebesar 0,562 (56,20%), terdapat sebesar 0,438 (43,80%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti. Sistem Pencatatan (X1) sebesar 0,203 (20,30%) , Sistem Pengikhtisaran (X2) sebesar 0,178 (17,80%), dan Sistem Pelaporan (X3) sebesar 0,181 (18,10%), Berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segalapuji dan syukurpenulishaturkanataskehadirat Allah SWT, karenalimpahanhidayah dan karunianyalahsehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenelitianini. Sholawat sertasalamsemogataptercurahkankepadabagindanabi Allah Muhammad SAWyang telahmembawakitadarialamkejahliaanmenujualam yang penuhilmupengetahuan. Adapun juduldaripenelitianini yaitu : “

PengaruhSistemAkuntansiKeuangan Daerah TerhadapKualitasLaporanKeuangan”.

Dalam penelitianini, penelitisangatmenyadaribahwapenelitianinimasihsangatjauhdari kata sempurna. Oleh Karenaitupenelitimengharapkan saran dan kritik yang sifatnyamembangunkearahperbaikan dan kesempurnaanpenelitianini. Melaluikesempataninipenulismengucapkanterimakasih yang sebesar-besarnyakepada Bapak Muh Ichsan Gaffar SE., M.Ak, SelakuKetua Yayasan PengembanganIlmuPengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, SE., M.SiSelakuRektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si Selaku Dekan FakultasEkonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA SelakuKetuaJurusan Program Studi AkuntansiFakultasEkonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Arifin SE, M.Si Selaku Bimbingan I, Bapak Rusdi Abdul Karim SE,M.Ak Serta Lukman

Husain dan rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan motifasi sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

Taklupa pula sayaucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti untuk mendukung dan selalu mendukung peneliti. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, Mei 2022

Penulis

HardiyaniArafah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Teori	7
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi	7
2.1.2 Pengertian Akuntansi	9
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.5 Keuangan Daerah	17
2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	23
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan	26
2.1.8 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan	30
2.1.9 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
2.3 Hipotesis.....	35

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	37
3.2 Metode Penelitian	37
3.2.1 Metode Yang Digunakan	37
3.2.2 Operasional Variabel.....	38
3.2.3 Populasi dan Sampel	39
3.2.3.1 Populasi	39
3.2.3.2 Sampel	40
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.4.1 Jenis Data.....	41
3.2.4.2 Sumber Data	42
3.2.4.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.5 Pengujian Instrumen Penelitian.....	43
3.2.5.1 Uji Validitas.....	43

3.2.5.2 Uji Reliabilitas	45
3.2.6 Konversi Data.....	46
3.2.7 Metode Analisis Data.....	47
3.2.8 Pengujian Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian	50
4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lokasi Penelitian	51
4.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi.....	53
4.1.4 Struktur Organisasi.....	62
4.2 Analisis Deskriptif	63
4.2.1 Karakteristik Responden	63
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	65
4.3.1 Karakteristik Variabel Penelitian	65
4.3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	74
4.4 Pengujian Hipotesis	77
4.4.1 Analisis data Statistik	79
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Operasional Variabel X.....	38
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y.....	39
Tabel 3.3 Bobot Nilai Variabel	39
Tabel 3.4 Populasi Penelitian	40
Tabel 3.5 Sampel.....	41
Tabel 3.6 Indeks Korelasi	45
Tabel 3.7 Jadwal Penelitian	50
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	64
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	64
Tabel 4.4 Skala Penelitian Jawaban Responden	65
Tabel 4.5 Nilai Variabel Sistem Pencatatan (X1)	66
Tabel 4.6 Nilai Sistem Pengikhtisaran (X2)	68
Tabel 4.7 Nilai Variabel Sistem Pelaporan (X3)	70
Tabel 4.8 Nilai Kualitas Laporan Keuangan (Y)	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pencatatan (X1)	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pengikhtisaran (X2)	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pelaporan (X3)	76
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)	76
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel X Terhadap Y	77
Tabel 4.14 Dekomposisi Pengaruh Variabel X Terhadap Y	80

DAFTAR GAMBAR

Gamber 2.1 KerangkaPemikiran	36
Gambar3.1 StrukturPengaruh X1, X2, dan X3 Terhadap Y	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	62
Gambar 4.2 Hasil Analisis Pengaruh Variabel X Terhadap Y.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang mewajibkan diseluruh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2015. Hal ini menjadi tantangan baru, yaitu membutuhkan sebuah pedoman yang dapat mensukseskan proses pernbangunan sistem akuntansi berbasis akrual secara detail agar berjalan dengan baik. Aset daerah memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sehingga memerlukan pengelolaan yang benar karena merupakan salah satu indikator dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu dengan penyajian laporan aset yang benardalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP. Sebagai upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara / daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Peryataan tersebut telah diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan permendagri No. 13 tahun 2006

Apabila laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah daerah tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas. Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (comparability).

Berdasarkan peneitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2016) menunjukan hasil bahwa variable implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan variable implementasi sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Charolina Dan Husain, (2017) bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas di

Pemerintah Kabupaten Jambrana)”. Berdasarkan hasil analisis data maka kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah Jambrana. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya pada penelitian kali ini peneliti ingin menguji Seberapa Besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat Ketidakbenaran hasil pada Variabel Sistem informasi Akuntansi yang tidak mencantumkan prosedur dan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas sehingga menimbulkan hasil bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak Berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Maka pada wawancara pada penelitian kali ini peneliti menambahkan prosedur dan karakteristik yang baik karena msih terjadi kesalahan seperti ketidakkonsistenan dalam pengelolaan dalam laporan keuangan. Prosedur yang digunakan yaitu, Prosedur Pencatatan, Prosedur Pengikhtisaran, Prosedur Pelaporan dan menggunakan krakteristik laporan keuangan yang baik, berikut ini merupakan persyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Relevan, Andal, Dapat di Bandingkan dan dapat Dipahami).

Jika tidak menggunakan prosedur dan karakteristik yang baik dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Kualitas laporan Keuangan

menjadi tidak relevan dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sangat perlu mendapat perhatian sehingga dapat membantu jalannya aktifitas pada kantor Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang terdiri atas pencatatan (X1), Pengikhtisaran (X2), Pelaporan (X3), secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
2. Apakah Pencatatan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
3. Apakah Pengikhtisaran (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

4. Apakah Pelaporan (X3) secara persial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang terdiri atas pencatatan (X1), Pengikhtisaran (X2), Pelaporan (X3), secara *simultan* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pencatatan (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Pengikhtisaran (X2) secara persial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

4. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaporan (X3) secara persial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman dan wawasan terutama berhubungan dengan Sistem Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan manfaat sebagai masukan dalam menambah wawasan pengetahuan dan sumber Informasi terhadap pemerintah daerah dalam melakukan sistem keuangan daerah.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas serta Sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang nantnya akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar atau tidak manusia terlibat dalam sebuah sistem, misalnya sistem transportasi, sistem pendidikan, sistem pernafasan, sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Dari berbagai jenis sistem yang telah diidentifikasi, menurut West Churchman dalam Krismaja 2015, menjelaskan bahwa sistem dapat mendefinisikan sebagian serangkaian komponen koordinasikan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Puspitawati (2011:57) sistem yang berfungsi untuk mengorganisasikan formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan sehingga dapat dengan mudah mengelola perusahaan

Menurut Sutabri (2012:20) sistem suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Kadir (2014:8), sistem mencakup sejumlah komponen (manusia, computer, teknologi informasi dan prosedur kerja) ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Kemudian Krismiaji 2015, mengemukakan bahwa sebuah sistem memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

- a) Komponen, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan.
- b) Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem
- c) Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponentersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah serangkaian elemen-elemen yang saling terkait dan saling bekerja satusama lain atau dengan kata lain bahwa sistem akuntansi adalah organisasi yang terdiridari formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data, yang dikoordinasi sedemikian rupa yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang berupa laporan-laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi dan mempermudah dalam mengelola perusahaan, serta untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang berupa laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak lain yang

berkepentingan serta investor kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasional

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat meringkas, mengelola dan menyajikan data, trak serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan schingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputus serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Sugiri dan Riyono (2008), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional

Berikut merupakan beberapa contoh keputusan ekonomik adalah sebagai berikut, Supiri dan Riyono (2008):

1. Menerima atau menolak permintaan kredit (bagi bank atau lembaga keuangan lain yang sedang mempertimbangkan permintaan kredit dari nasabah atau colon nasabahnya)
2. Melepas kembali atau mempertahankan saham (surat tanda pemikiran pada persero terbatas) yang sekarang dimiliki,
3. Mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik dana dari masyarakat

Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut:

1. Input (masukan) berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan
2. Proses (prosedur) meliputi berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasi transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi yaitu penjumlahan dan pemindahbukuan
3. Output (keluaran) : berupa informasi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Menurut Sumarsan (2013:1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Metode pencatatan penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan

3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Wiwin Yadianti, Itham Waliyudin (2006 : 6-7) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntasi yaitu:

1. Mengidentifikasi kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pemebalian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut
2. Mencatat Secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkas.
3. Mengkomunikasikan kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Syamsi (1986) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumberkewangan asli daerah dalam memenuhi

kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Menurut (Sumardjo, 2010) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan dengan memperhatikan keluaran dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Pemerintah merupakan suatu organisasi penyelenggara pembangunan wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Pelayanan publik yang diberikan tersebut akan di pertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah membutuhkan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer untuk menilai suatu pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah tercapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan posisi kewangan penting yang berasal dari transaksi transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kewangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan

Menurut Malumnadi (2010) jenis-jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi: 1) Neraca, 2) Laporan Realisasi Angaran (LRA), 3) Laporan Anu Kas 4) Catatan atas laporan keuangan (CaLK), 5) Lampiran laporan keuangan BUMD. Dari lima jenis laporan tersebut biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya

tiga laporan utama yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas

Untuk lebih jelasnya maka berikut ini disajikan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut :

1) Elemen Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening. Setiap rekening dirinci hingga level rincian objek Penyajian di laporan keuangan publikasian biasanya cukup ditampilkan rekening utama dan sebrekening satu level dibawahnya.

2) Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas empat pos utama yaitu:

- a) Pendapatan. Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu:
 - i. Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri atas 1) Pendapatan pajak daerah, 2) Pendapatan retribusi daerah, 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah.
 - ii. Pendapatan Transfer. Pendapatan transfer meliputi: 1) transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan (dana

bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, 2) transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus, dana alokasi khusus, 3) transfer pemerintah provinsi khusus untuk pemerintah kabupaten dan kota yaitu pendapatan bagi hasil pajak, dan dana penyesuaian

iii. Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi, 1) pendapatan hibah,

b) Belanja Pos belanja terdiri atas tiga komponen yaitu

i. Belanja Operasi. Belanja operasi meliputi: 1) belanja pegawai, 2) belanja barang, 3) bunga, 4) subsidi, 5) hibah, 6) bantuan social

ii. Belanja Modal. Belanja modal meliputi; 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja gedung dan bangunan, 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya, 6) belanja aset lainnya.

iii. Belanja Tak Terduga. Belanja tak terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi. Belanja tak terduga dapat berupa : 1) bantuan bencana alam, 2) bantuan bencana sosial, 3) bantuan korban politik.

c) Transfer. Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi

pengeluaran transfer berupa transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten kota, meliputi: bagi hasil pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota.

- d) Surplus/ (Defisit). Selisih antara pendapatan dan belanja di catat dalam pos surplus atau (defisit). Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dana belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran
- e) Pembiayaan Pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu; 1) penerimaan pembiayaan dan 2) pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran di catat dalam pos pembiayaan netto.
- f) SILPA / SIKPA Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.

3) Elemen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu :

- 1) arus kas dari aktivitas operasi, 2) arus kas dari aktivitas investasi, 3) arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan 4) arus kas dari aktivitas non anggaran dari masing-masing aktivitas tersebut di pilah lagi menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas

4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran, maupun laporan arus kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. CaLK menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD untuk menyiapkannya

2.1.5 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo,2002:9). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk menbiayai kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Almad Yani, 2002:350).

Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi

pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian,
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, yang kenudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaran tugas pemerintahan.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan

Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Ahmad Yani, 2002:355).

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- (1) laporan realisasi;
- (2) neraca,
- (3) laporan arus kas;
- (4) catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK (Ahmad Yani, 2002: 356).

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisalkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Kcuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan

2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan olehpara ahli sebagai berikut: Adapun menurut Erlina (2013:6) mengatakan baliwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Sementara menurut Halim (2007:43) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Bastian (2010:319), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
 - a. Kegiatan pengidentifikasi dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksidan bukti pencatatan
 - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
 - c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
- 2) Pengikhtisaran
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama

akun atau rekening besertajumlah saldoanya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan
- f. Pembuatan ayat jumlah pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3) Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Sedangkan Menurut Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses akuntansi dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana (2010: 96) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidak sesuaian serta dipakai melalui pemeriksaan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pertanggungjawaban oleh suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan

Laporan keuangan adalah catatan informasi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Sedangkan menurut Rosdiani (2011) menyatakan kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capainya kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dari suatu entitas (Choiriyah: 2010). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengerusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP NO. 71 Tahun 2010), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). Karakteristik laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskaan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:

1. Memiliki umpan balik, informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif, informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

4. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
2. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu
4. Dapat Dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

c. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud

2.1.8 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Gala (2013) sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparasi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sedangkan Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angraini (2016) Dengan adanya sistem pengendalian interen yang efektif dan baik maka akan meningkatkan akuntabilitas. Pengendalian interen merupakan salah satu mekanisme paling menting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan untuk organisasi memantau dan mengontrol operasi mereka. Soleha (2014) menghasilkan bahwa aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan memberikan pengaruh yang signifikan. Dengan adanya sistem pengendalian interen yang efektif dan baik maka akan meningkatkan akuntabilitas. Pengendalian interen merupakan salah satu mekanisme paling menting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan untuk organisasi memantau dan mengontrol operasi mereka.

Sedangkan menurut Santoso (2016) mengatakan bahwa dengan meningkatnya sistem pengendalian interen pemerintah belum tentu akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak mungkin dibutuhkan

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP NO. 71 Tahun 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki hubungan signifikan dengan kualitas laporan keuangan

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Berikut yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

Table 2.1Penelitian Terdahulu

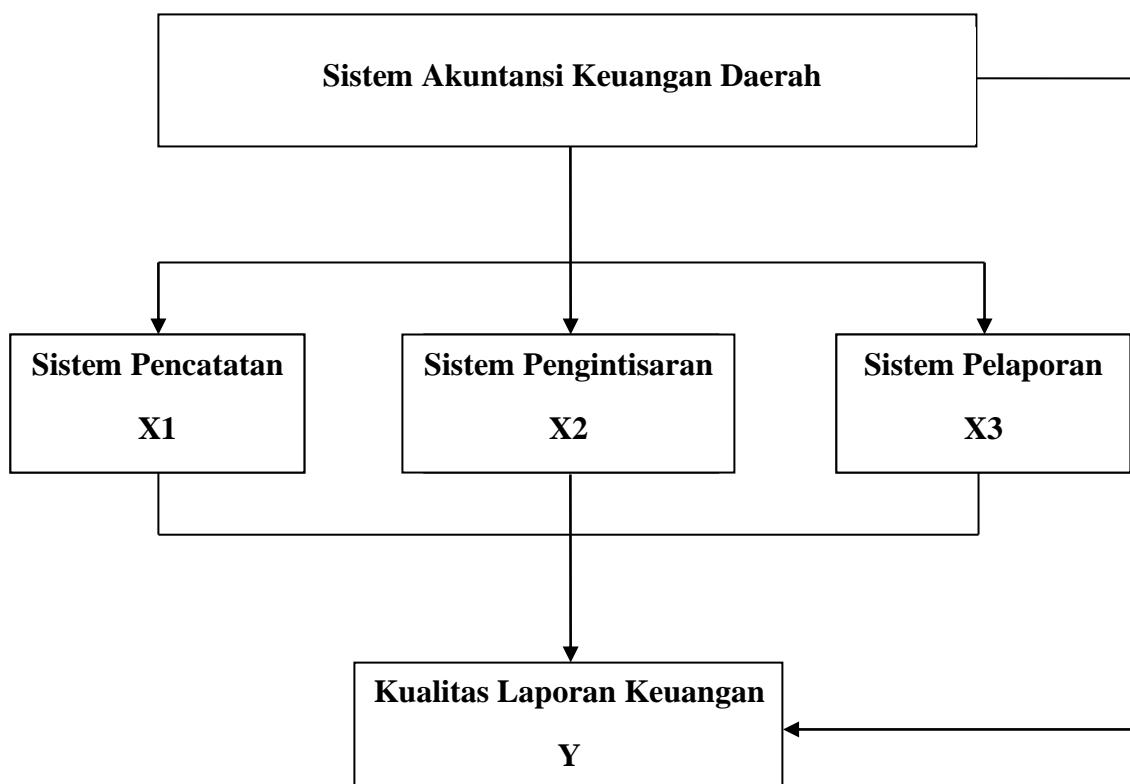
Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Komalasari (2016)	Pengaruh Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dan sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPPKAD Pada Kabupaten sumbang)	Hasil yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara persial sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dimana besarnya

		<p>pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebesar 33,1% dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memberikan pengaruh sebesar 43,7% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan aerah sebesar 76,8% sedangkan sisanya sebesar 23,2% merupakan factor lain diluar variable independen yang sedang diteliti,seperi kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>
Meta Dewi Rianisanti (2017)	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapassitas Sumber Daya Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten)	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber Daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa sistem pengendalian intern tidak mendominasi hubungan antara pemanfaatan sistem Informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan</p>

		pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Silvia Djakaria (2018)	Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya Terhadap Laporan Keuangan Daerah (studi pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Gorontalo Utara)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta kapasitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kerangka pemikiran

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang Seberapa besar “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango”.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang terdiri dari Pencatatan (X1), Pengikhtisaran (X2). Sistem Pelaporan (X3), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
2. Sistem Pencatatan (X1) seacara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Pengikhtisaran (X2) seacara parsial berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Pelaporan(X3) seacara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari : Pencatatan (X1), Pengikhtisaran (X2), Pelaporan (X3) Serta KualitasLaporanKeuangan (Y) yang berlokasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode Yang Digunakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey dengan paradigma (tingkat eksplanasi) asosiatif sebab kibat menggunakan data kuantitatif. Penelitian survey adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrument terutama untuk mengumpulkan data. Sementara definisi metode survei menurut Kerlinger dalam Riduwan (2004), mengatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Penelitian asosiatif/korelasion adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih dengan tingkat eksplanasi hubungan sebab/akibat pengaruh (Sugiono, 2016). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.

3.2.2. Operasional Variabel

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variable yang sedang diteliti. Karlinger dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*construct*) atau sifat yang akan dipelajari. Lebih lanjut Karlinger (2016) menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*). Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai operasionalisasi variable dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel X

Variabel	Sub Variabel	Indikator-indikator	Skala
Sistem Akuntasi Keuangan Daerah (X)	Pencatatan (X1)	1. Mengidentifikasi 2. Pengukuran 3. Buku harian atau jurnal 4. Pengelompokan kebuku besar	Ordinal
	Pengikhtisan aran (X2)	1. Penyusunan neraca saldo 2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian 3. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur	
	Pelaporan (X3)	1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda kepada DPRD 3. Rancangan perda disetujui oleh kepala daerah dan DPRD 4. Melaporkan keseluruhan laporan keuangan	Ordinal

Sumber :Bastian (2010)

Tabel 3.2 Operasional Variabel Y

Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Keuangan (Y)	Laporan 1. Dapat Dipahami 2. Relevan 3. Keandalan 4. Dapat dibandingkan	Ordinal

Sumber : PP No.71 Tahun 2010

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert, kuesioner disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan jawaban yang disesuaikan dengan pertanyaan kuisioner yakni: Sangat Puas, Puas, Cukup Puas, Tidak Puas, dan Sangat Tidak Puas. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Puas/ Selalu	5
Puas/ Sering	4
CukupPuas/ Kadang-kadang (netral)	3
Kurang Puas/ Jarang	2
Tidak Puas/ Tidak Pernah	1

Sumber: Riduwan (2015)

3.2.3. Populasi dan Sampel

3.2.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2015). Jadi populasi bukan hanya orang,tetapi objek dan benda-benda alam lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai badan di Badan Keuangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah 70 orang

Tabel 3.4 Populasi Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan	1 orang
2	Bidang Pendapatan	9 orang
3	Bidang Akuntansi	11 orang
4	Bidang Anggaran dan perbendaharaan	4 orang
5	Bidang Aset	4 orang
6	Staf Akuntansi	1 orang
7	Staf Pegawai	40 orang
Total		70 orang

3.2.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016;81) sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dapat digunakan untuk mewakili seluruh populasi yang ada. Peneliti menggunakan penarikan sampel dengan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non

probability sampling. Yaitu dimana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan pendekatan Purposive Sampling. Maka sampel yang dipilih sebanyak 30 orang pegawai di Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Table 3.5 Sampel

No	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan	1 orang
2	Bidang Pendapatan	9 orang
3	Bidang Akuntansi	11 orang
4	Bidang Anggaran dan perbendaharaan	4 orang
5	Bidang Aset	4 orang
6	Staf Akuntansi	1 orang
Total		30 orang

Sumber : BKPD, Kabupaten Bone Bolango

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016) jenis data terdiri dari jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kuantitatif. Adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuisioner dengan menggunakan skala likert yang disebarluaskan kepada responden.

2. Data kualitatif. Adalah data yang bukan merupakan data bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan serta gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi perusahaan/instansi pemerintahan atau sejarah perusahaan atau instansi pemerintahan.

3.2.4.2. Sumber data

Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari para responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner/angket
2. Data sekunder. Data sekunder berupa data informasi penunjang penelitian. Didapat dan diolah dari sumber interen instansi pemerintahan, maupun sumber eksteren dari lain yang berkorelasi dan relevan yang berasal dari jurnal-jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan penelitian.

3.2.4.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, mengamati kegiatan kantor berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Angket, yaitu daftar pertanyaan/kuisisioner yang diberikan peneliti kepada responden dilapangan.
3. Wawancara, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah informasi dari pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki keterkaitan tersebut dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
4. Pengamatan (observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung keobjek penelitian atau lokasi penelitian.
5. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dari lokasi penelitian ini.

3.2.5. Pengujian Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Reliabilitas)

3.2.5.1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2011) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian menurut Sugiyono (2016) instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (2016) menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria (skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variable. Selanjutnya dalam memberikan terinterpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi *pearson product moment* sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X).(\sum Y)}{\sqrt{\{n. \sum X^2\}. \{n. \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r = Angka korelasi

X = Skor Pertanyaan (ke-n) variabel X

Y = Skor Pertanyaan (ke-n) variabel Y

n = Jumlah responden

XY = Skor pertanyaan dikali total pertanyaan

Kriteria pengujian untuk taraf nyata $\alpha = 0,05$. Maka hipotesis nol (H_0) diterima jika $t_{(1 - 1/2\alpha)} < t < t_{(1 - 1/2\alpha)}$ dimana

distribusi t yang digunakan mempunyai dk = (n-2) dalam hal lainnya Ho ditolak dan rumus yang digunakan yaitu :

$$t_{Hitung} = \frac{\sqrt{r \cdot n - 2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai Hitung

r = Korelasi antara sampel X dan Y

n = Jumlah responden

Tabel 3.6
Indeks Korelasi

Interval koefisien(r)	Tingkat Hubungan
0,800 - 1,000	Sangat Tinggi
0,600 - 0,799	Tinggi
0,400 - 0,599	Cukup Tinggi
0,200 - 0,399	Rendah
0,000– 0,199	Sangat Rendah

Sumber :Riduan (2004)

3.2.5.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Instrumen dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel (Ghozali,2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reabilitas ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja.

peneliti ini menggunakan rumus :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum si}{st} \right)$$

Dimana :

K = Jumlah instrument pertanyaan

$\sum S_i$ = Jumlah varians dalam setiap instrumen

S = Varian keseluruhan Instrumen

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot*

atau pengukuran sekali saja dengan alatb antu SPSS uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2013:47). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reabilitas datanya semakin terpercaya.

3.2.6. Konversi Data

Untuk dapat diolah menjadi analisis jalur yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda, data orginal yang biasanya di dapat dengan menggunakan skala likert dan lain – lain (*skor Kuessioner*) maka terlebih dahulu data ini harus di transformasikan menjadi data interval. Salah satu cara yang dapatdigunakan adalah *Menthod of Succesive Interval* (MSI).

Menurut Harun Al-Rasyid dalam Riduwan dan Engkos Kuncoro (2007) langkah-langkah *Menthod of Succesive Interval* (MSI) adalah sebagai berikut :

1. Hitung Frekuensi (f), setiap skor(1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya.

2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah frekuensi (f) dengan jumlah n sampel.
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden.
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi.
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan table 4 (ordinates Y the Normal Curve a Z).
6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV \text{ (Scale Value)} = \frac{(\text{Density at lower limit}) - (\text{density at upper limit})}{(\text{Area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

Keterangan :

- Density at Lower Limit : Kepadatan batas bawah
- Density at Upper Limit : Kepadatan batas atas
- Area Under Upper Limit : Daerah dibawah batas atas
- Area Under Lower Limit : Daerah dibawah batas bawah

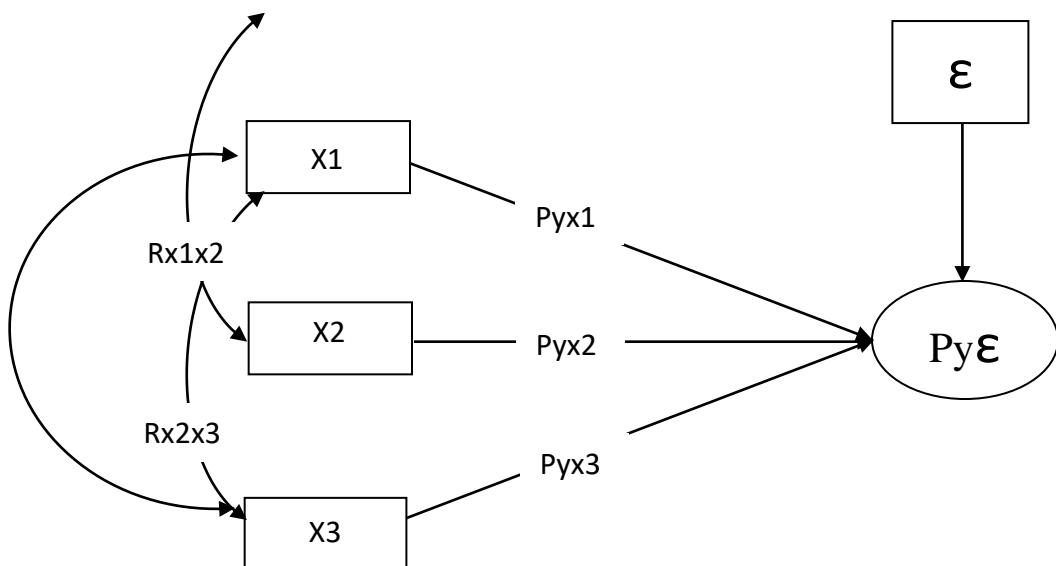
3.2.7. Metode Analisis Data

Untuk memecahkan masalah dan membuktikan hipotesis, seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), maka pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis jalur(*Path Analisys*) dengan terlebih dahulu mengkonvers data skala ordinal ke skala interval melalui

method successive interval (MSI). Analisis jalur digunakan dengan pertimbangan bahwa pola hubungan antara variable dalam penelitian adalah bersifat korelatif dan kausalitas.

Hipotesis penelitian diperlihatkan melalui struktur hubungan antara variable independen dengan diagram jalur ini dapat dilihat pada struktur jalur berikut :

Gambar 3.1 Struktur Pengaruh X1, X2, dan X3 Terhadap Y



Keterangan :

X1 = Sistem Pencatatan

X2 = Sistem Pengintisaran

X3 = Sistem Pelaporan

Y = Kualitas Laporan Keuangan

ϵ = Variabel lain yang mempengaruhi Y

r = Korelasi

Py = Koefisien Jalur Untuk Mendapatkan Pengaruh Langsung

Data yang terkumpul dianalisis hubungan kasualnya antara variable-variabel atau dimensi-dimensi yang dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang memperhatikan pengaruh. Gambar diatas juga memperlihatkan bahwa sub-sub variable tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh X_1, X_2 , dan X_3 tetapi ada variable epsilon (ϵ) yaitu variable yang tidak diukur dan diteliti.

3.2.8. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, maka dalam menguji hipotesi menggunakan *path analysis* (Nirwana dalam Ucon Arif, (2006:26) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat persamaan struktural, yaitu :

$$Y = PYX_1 + PYX_2 + PYX_3 + Py\epsilon$$

- Menghitung matriks korelasi antar X_1, X_2, X_3 , dan Y
- Menghitung matriks antar variable eksogenus
- Menghitung matriks invers R_{1-1}
- Menghitung Koefisien jalur P_{YX_i} ($i = 1, 2, \text{ dan } 3$)
- Menghitung R^2 yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total X_1, X_2 , dan X_3 terhadap Y
- Menghitung pengaruh variable lain ($Py\epsilon$) dengan menggunakan rumus :
- $\sqrt{Py\epsilon} = 1 - R^2y (X_1, X_2, X_3)$

- i. Menghitung pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kaupaten Bone Bolangodibentuk berdasarkan pasal 3 ayat (3), peraturan Daerah Kaupaten Bone Bolango nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Bone Bolango tentang susunan organisasi, penjabaran tegas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

Undang-undang nomor 38 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi Gorontalo (Lembaga Repoblik Indonesia Tahun 2002 nomor 258,tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4060). Undag-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pementukan Kabupten Bonen Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4269).

Sementara itu pararel dengan pembuatan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan mewakili rancangan kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada resta SKPD dan mengacu pada RKPD dijadikan dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

(RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen rencana tahunan, penyusunanya dengan memperhatikan seluruh apresiasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan menimbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk rencangan renja SKPD.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 2017 sesuai dengan peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango maka Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) berubah menjadi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

4.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BKPD Kabupaten Bone Bolango

Rencana Strategi (Renstra) merupakan penjaaran lebih lanjut dari program pembangunan daerah, dengan memperhatikan hasil analisis lingkungan strategi baik internal maupun eksternal yang ada maupun yang akan terjadi. Badan Keuangan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango telah menyusun rencana strategi yang memuat visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango Periode 2016-2023.

Visi Sebagai pengelolah Keuangan Daerah yang terpercaya guna mendorong terwujudnya tata pemerintah daerah yang baik (Good Governance). Kata kunci dari Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kaupaten Bone Bolango tidak lain adalah “Sebagai mana menjadi pengelolah keuangan daerah yang terpercaya (Amanah) Guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah serta asset yang tertib,efisien,transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undangan”.

Misi yaitu terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peratuan perundangan misi yang dirumuskan untuk “Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang professional”.

Tujuannya yaitu “Pengelolaan Keuangan Derah Semakin Berkualitas” dengan indicator tujuan “Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah” Dengan Saran sebagai berikut.

Sasarannya yaitu 1).Terwujudnya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah 2).Terwujudnya peningkatan pengelolaan barang milik daerah 3).Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan indicator sasaran: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bone Bolango

Uraian tugas pokok dan fungsi perangkat BKPD Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

1. Kepala Badan mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, dan mempunyai fungsi yaitu:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dibidang keuangan.pendapatan dan asset daerah.
 - b. Pengkoordinasian perumusan keijakan teknis dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah.
 - c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang keuangan,pendapatan dan asset daerah
 - d. Pengkoordinasian penataan dan mengoordinir pelaksanaan teknis orasional dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah.
 - e. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang keuangan, pendapatan asset daerah.
 - f. Pengkoordinasian penyelanggaraan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang keuangan dan pendapatan asset daerah.
 - g. Pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan penelitian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang keuangan, pendapatan asset daerah.

- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan pendapatan dan asset daerah
 - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dari kewenangan badan.
2. Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bida Bidang sekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan bidan tugasnya, serta mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu :
- a. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunann rencana strategi program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan tahunan
 - b. Penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu
 - c. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dalam kepegawaian, keuangan, perencaan program, evaluasi dan pelaporan
- Sekretariat terdiri dari :
1. Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki fungsi melaksanakan tugas dinas dibidang umum dan kepegawaian yakni:
- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan

- b. Melakukan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - c. Menyususn perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan
 - d. Melaksanakan inventaris, pemeliharaan dan penataausahaan asset milik Negara dan Daerah
 - e. Melaksanakan perencanaankebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga dan
 - f. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas badan dibidang keuangan serta tugas-ugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya sertamemiliki fungsi lainnya yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan
 - b. Menyusun rencana penggunaanggaran berdasarkan rencana oprasional kegiatan
 - c. Mencatat, mengelolah dan menganalisis data pelaksanaan anggran rutin dan pembangunan
 - d. Menginvertaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja

- e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis
 - f. Menggumpulkan, mengelolah penyajian data perencanaan
 - g. Melakukan evaluasi pelaksanaan program
 - h. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya
3. Sub bagian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang perencanaan dan memiliki fungsi lainnya yaitu :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategi program dan kegiatan tahunan
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program pembangunansarana dan prasarana
3. Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan data pelaporan, serta memiliki fungsi lainnya yaitu :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistem akuntansi sebagai tugas
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan

- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas kewenangan badan.

Bidang akuntansi terdiri dari :

1. Sub bidang pengelolaan data dan pelaporan memiliki fungsi yaitu :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - c. Melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara periodic
 - d. Melaksanakan penyusunan dokumen/data laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pada suatu bidang pengelolaan data dan pelaporan
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya
2. Sub bidang pengembangan sistem akuntansi memiliki fungsi yaitu :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan akuntansi
 - b. Melaksanakan penyusunan keijakan teknis dibidang pengembangan sistem akuntansi

c. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan realisasi APBD

d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laoran oprasioanal, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran Leb dan catatan atas laporan keuangan

4. Bidang pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinaksikan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan program dibidang pendapatan daerah
- b. Mengkoordinasikan penyusunan standar oprasional proses penguatan pajak daerah dan restribusi daerah, PBB dan BPHTB
- c. Mengkoordinir pendapatan subjek dan objek pajak serta penilaian objek pajak daerah dan restribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Mengkoordinir perekaman, pengelolaan data, analisis, pencatatan dan penyajian informasi pendapatan daerah
- e. Mengkoordinaksikan penerbit ketetapan pajak daerah berdasarkan laporan intensifikasi pajak daerah
- f. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pengendalian pengawasan terhadap unit kerja terkait dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang pendapaan terdiri dari :

1. Sub bidang pajak daerah yang memiliki fungsi sebagai yang melaksanakan tugas dalam urusan pajak daerah serta memiliki fungsi lainnya yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait pajak daerah
 - b. Melaksanakan penyiapan terkait kebijakan teknisi dibidang pelayanan pajak daerah
 - c. Menghimpun dan mengelolah data objek pajak dan subjek pajak daerah serta potensi penerimaan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
 - d. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
 - e. Melakukan penetapan pajak daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SPTPD)
 - f. Melakukan sosialisasi pajak daerah pada wajib pajak daerah
 - g. Melakukan pengawasan serta penagihan pajak
 - h. Melakukan penerimaan dan penyetoran pajak melalui bendahara penerimaan penyetoran kas daerah melalui surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat tanda setora (STS)
 - i. Melakukan pembukuan atau penerimaan pajak daerah dan
 - j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya
5. Bidang Anggaran Dan Pembendaharaan terdiri dari :

Bidang anggaran dan pengendalian anggaran yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran
- b. Melaksanakan peyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan teknis APBD
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan penyusunan laporan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya

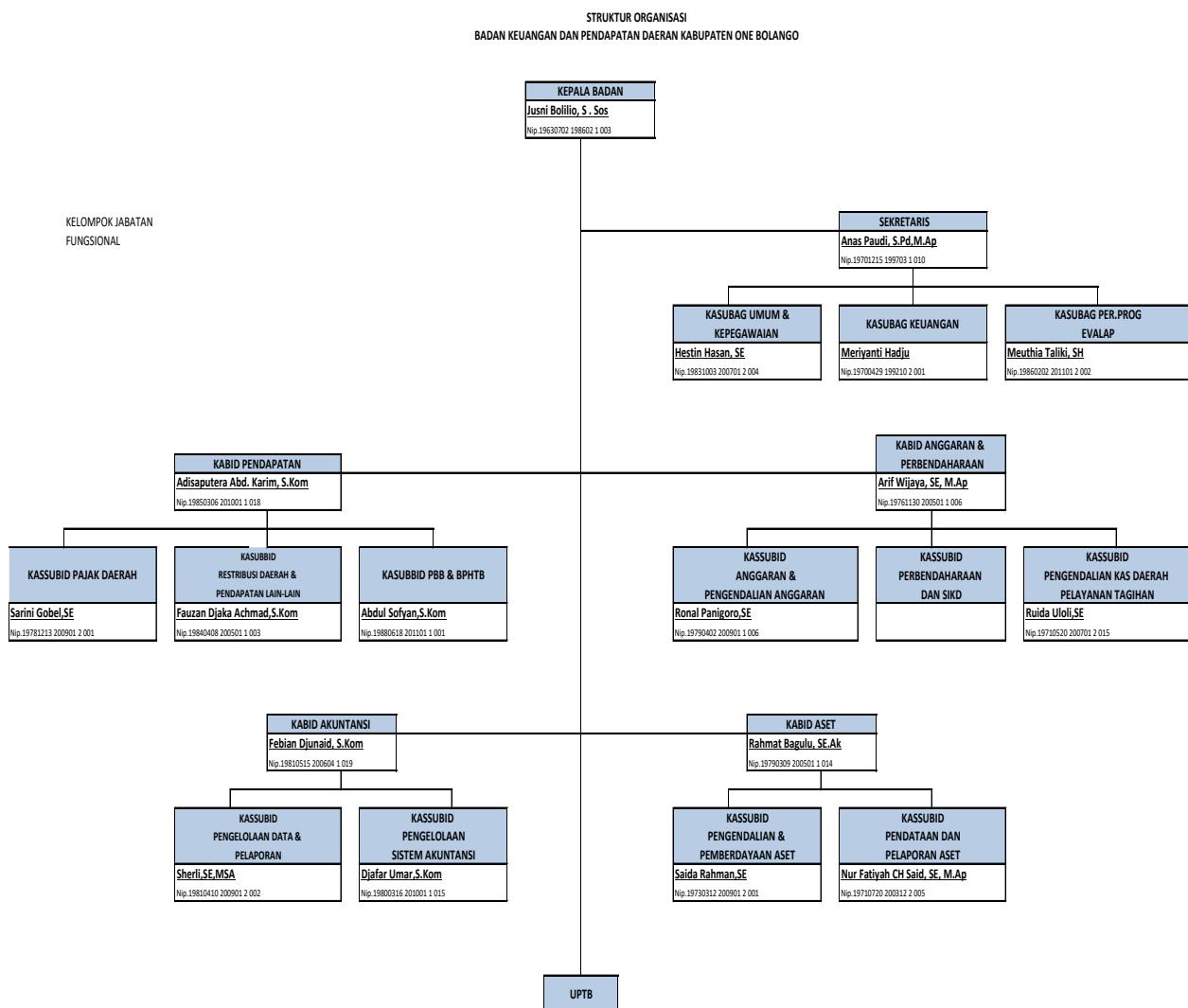
Sub bidang pembendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pembendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah
- 2. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pembendaharaan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas
- 3. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
- 4. Melaksanakan penyusunan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan
- 5. Melaksanakan penelitian daftar gaji
- 6. Melaksanakan penyiapan draf SKPP

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang pembendaharaan dan sistem informansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan
 8. Pelaksanaan fung-fungsi lainnya
6. Bidang Aset
- a. Bidang asset mempunyai tugas :
 - b. Melakukan tugas pengelolaan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya kekayaan daerah
 - c. Dalam melaksanakan tugas dibidang asset, menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 2. Menyusun keijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 3. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit
 4. Merencanakan pengadaan dan pendistribusian barang milik daerah sesuai dengan keutuhan daerah sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah
 5. Menginventaris barang milik daerah sesuai dengan jenisnya untuk mengetahui keadaan kekayaan daerah

6. Melakukan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dibebaskan dari daftar inventaris kekayaan daerah
7. Menyusun rencana pernyataan modal/investasi daerah sesuai kebutuhan untuk peningkatan pendapatan daerah
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan

4.1.4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari analisis karakteristik responden analisis statistik deskriptif. Pembahasan masing-masing deskriptif sebagai berikut :

4.2.1. Karakteristik Responden

Karakteristik yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin dan usia. Deskripsi Karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Responden menurut kelamin

Tabel 4.1
Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	laki-laki	14	47%
2	Perempuan	16	53%
Total		30	100%

Sumber : data Olahan,2022

Jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini karyawan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah kabupaten Bone Bolango berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 14 orang berjenis kelamin laki- laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan.

2. Responden menurut jenis Usia

Sasaran responden pada penelitian ini adalah karyawan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah kabupaten Bone Bolango, usia responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Klasifikasi responden berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	Diatas 45 tahun	8	27%
2	Diantara 26 - 44 tahun	15	50%
3	Dibawah 25 Tahun	7	23%
	Total	30	100%

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 30 responden yang disajikan sampel penelitian sebanyak 8 orang responden yang berusia diatas 45 tahun atau sebesar 26,6%, sebanyak 15 orang responden yang berusia diantara 26-44 tahun atau sebesar 50% dan responden yang berusia dibawah 25 tahun sebanyak 7 orang responden atau sebesar 23,3%

3. Responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.3
Klasifikasi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Strata 2	3	10%
2	Strata 1	13	43%
3	Diploma 3	8	27%
4	SMA Sederajad	6	20%
	Total	30	100%

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 30 Responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 3 orang responden yang berpendidikan Strata 2 atau sebesar 10%, sebanyak 13 orang responden yang berpendidikan Strata 1 atau sebesar 43%, sebanyak 8 orang responden yang berpendidikan Diploma 3 atau sebesar

27%, dan sebanyak 6 orang responden yang berpendidikan SMA Sederajad atau sebesar 20%

4.3. Diskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kewajaran Pengelolaan Penjualan (Y). Bobot-Bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot *option* (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot *option* dengan frekuensi. Berikut perhitungannya :

Bobot terendah x Item x Jumlah responden : $1 \times 1 \times 30 = 30$

Bobot tertinggi x Item x Jumlah responden : $5 \times 1 \times 30 = 150$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagai berikut :

$$\text{Rentang skalanya yaitu } \frac{150 - 30}{5} = 26$$

Tabel- 4.4
Skala penelitian jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	30 - 57	Sangat rendah
2	58 - 83	Rendah
3	84 – 109	Cukup tinggi
4	110 – 135	Tinggi
5	136 – 150	Sangat tinggi

Sumber : hasil olahan data 2022

1) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pencatatan (X1)

Variabel Sistem Pencatatan terdiri dari 3 item pernyataan, Berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Variabel Sistem Pencatatan (X1). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Nilai (Skor) Variabel Sistem Pencatatan (X1)

Tang. Resp.	Item pernyataan X1.1			Item pertanyaan X1.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	17	85,0	57,6	18	90	60,0
4	10	40,0	33,3	12	48	40,0
3	2	6,0	6,7	-	-	-
2	1	2,0	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	133	100,0	30	138	100,0
Kategori	Tinggi				Sangat Tinggi	

Tang. Resp.	Item pernyataan X1.3			Item pertanyaan X1.4		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	18	90,0	60,0	17	85	56,7
4	11	44,0	36,7	12	48	40,0
3	1	3,0	3,3	1	3	3,3
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	137	100,0	30	136	100,0
Kategori	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	

Sumber Data: Kuesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X1) sebagai berikut : item 1 tanggapan responden

mengenai indikator Kegiatan Pencatatan Bukti Transaksi menunjukan sebanyak 17 orang (57,6%) memberikan jawaban selalu dilakukan kegiatan pencatatan dalam buku harian atau jurnal, 10 orang (33,3%) menjawab sering dilakukan kegiatan pencatatan dalam buku harian atau jurnal, 2 orang (6,7%) dan menjawab kadang-kadang dilakukan kegiatan pencatatan dalam buku harian atau jurnal, 1 orang atau (3,3%) menjawab tidak pernah dilakukan kegiatan pencatatan dalam buku harian atau jurnal dengan kategori tinggi

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator kegiatan pengukuran sebanyak 18 (60,0) orang memberikan jawaban selalu dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan,dan 12 orang (40,0) menjawab sering dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan dengan kategori sangan tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator kegiatan pengidentifikasi menunjukan sebanyak 18 orang (60,0%) memberikan jawaban selalu dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan, 11 orang (36,7%) menjawab sering dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan, dan 1 orang (3,3%) menjawab kadang-kadang dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator pemindahan bukuanmenunjukan sebanyak 17 orang (56,7%)

memberikan jawaban selalu diposting ke buku harian atau jurnal, 12 orang (40,0%) menjawab sering diposting ke buku harian atau jurnal, dan 1 orang (3,3%) menjawab kadang-kadang diposting ke buku harian atau jurnal dengan kategori Sangat Tinggi

Dengan demikian dari 4 item pernyataan pada sub variabel Sistem Pencatatan (X1) item pernyataan tertinggi adalah item pernyataan ke-2 dengan skor 138 (Sangat Tinggi) sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator pengukuran merupakan indicator yang mendominan dan paling tepat digunakan untuk mengukur sub variable Sistem Pencatatan (X1) yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengikhtisaran (X2)

Sistem pengikhtisaran (X2) terdiri dari 3 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban masing-masing indikator dari Sistem Pengikhtisaran (X2). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.6
Nilai (Skor) Sistem Pengikhtisaran (X2)

Tang. Resp.	Item pernyataan X2.1			Item pertanyaan X2.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	20	100,0	66,7	15	75	50,0
4	9	36,0	30,0	14	56	46,7
3	1	3,0	3,3	1	3	3,3
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	139	100,0	30	135	100,0
Kategori	Sangat Tinggi			Tinggi		

Tang. Resp.	Item pernyataan X2.3		
	F	Skor	%
5	23	115,0	76,7
4	5	20,0	16,7
3	2	6,0	6,7
2	-	-	-
1	-	-	-
Jumlah	30	141	100,0
Kategori	Sangat Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X2) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator penyusunan neraca saldo menunjukan sebanyak 20 orang (66,7%) memberikan jawaban penyusunan neraca saldo selalu berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, 9 orang (30,0%) menjawab sering dilakukan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, 1 orang (3,3%) dan menjawab kadang-kadang dilakukan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi dengan standar kategori sangat tinggi

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator pembuatan ayat jurnal menunjukan sebanyak 15 orang (50,0%) memberikan jawaban selalu dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akun-akun pada akhir periode, 14 orang (46,7%) menjawab sering dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akun-akun pada akhir periode,dan 1 orang (3,3%) menjawab kadang-kadang dilakukan

penyesuaian dengan menyesuaikan akun-akun pada akhir periode dengan standar kategori Tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Neraca Lajur menunjukkan sebanyak 23 orang (76,7%) memberikan jawaban selalu Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan, 5 orang (16,7%) menjawab sering Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan,dan 2 orang (6,7%) menjawab kadang-kadang Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan dengan kategori Sangat Tinggi.

Dengan demikian dari 3 item pernyataan pada sub variabel Sistem Pengikhtisaran(X2) item pernyataan tertinggi adalah item pernyataan ke-3 dengan skor 141 (Sangat Tinggi) sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur merupakan indicator yang mendominan dan paling tepat digunakan untuk mengukur sub variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan (X3)

Sistem Pelaporan (X3) terdiri dari 4 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban masing-masing indikator dari Sistem Pelaporan (X3). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Nilai (Skor) Variabel Sistem Pelaporan (X3)

Tang. Resp.	Item pernyataan X3.1			Item pertanyaan X3.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	22	110,0	73,3	7	35	23,3
4	6	24,0	20,0	20	80	66,7
3	2	6,0	6,7	3	9	10,0
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	140	100,0	30	124	100,0
Kategori	Sangat Tinggi			Tinggi		

Tang. Resp.	Item pernyataan X3.3			Item pertanyaan X3.4		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	4	20,0	13,3	24	120	80,0
4	14	56,0	46,7	3	12	10,0
3	10	30,0	33,3	3	9	10,0
2	2	4,0	6,7	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	110	100,0	30	141	100,0
Kategori	Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X3) sebagai berikut : item 1 tanggapan responden mengenai indikator pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menunjukkan sebanyak 22 orang (73,3%) memberikan jawaban selalu entitas harus menyusun laporan keuangan, 6 orang (20,0%) menjawab sering entitas harus menyusun laporan keuangan, dan 2 orang (6,7%) menjawab kadang-kadang entitas harus menyusun laporan keuangan dengan standar kategori Sangat Tinggi

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Kepala daerah menunjukan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu kepala daerah menyampaikan renvana perda kepada DPRD, 20 orang (66,7%) menjawab sering kepala daerah menyampaikan renvana perda kepada DPRD, dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang kepala daerah menyampaikan renvana perda kepada DPRD dengan standar kategori Tinggi

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Rencana Perda menunjukan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu disetujui oleh kepala Daerah dan DPRD, 14 orang (46,7%) menjawab sering disetujui oleh kepala Daerah dan DPRD, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang disetujui oleh kepala Daerah dan DPRD,dan 2 Orang (6,7%) menjawab tidak pernah disetujui oleh kepala Daerah dan DPRD dengan Standar kategori Tinggi

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator kepala daerah melaporkann keseluruhan laporan keuangan menunjukan sebanyak 24 orang (80,0%) memberikan jawaban selalu melaporkann keseluruhan laporan keuangan, 3 orang (10,0%) menjawab sering melaporkann keseluruhan laporan keuangan,dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang melaporkann keseluruhan laporan keuangan dengan standar kategori Sangat Tinggi.

Dengan demikian dari 4 item pernyataan pada sub vriabel Sistem Pelaporan (X3) item pernyataan tertinggi adalah item

pernyataan ke-4 dengan skor 141 (Sangat Tinggi) sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator Melaporkan Keseluruhan Laporan Keuangan merupakan indicator yang mendominan dan paling tepat digunakan untuk mengukur sub variabel Sistem Pelaporan (X3) yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango..

4) Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan Keuangan (Y) terdiri dari 4 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Kualitas Laporan Keuangan (Y).menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8
Nilai (Skor) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tang. Resp.	Item pernyataan X3.1			Item pertanyaan X3.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	23	115,0	76,7	24	120	80,0
4	3	12,0	10,0	5	20	16,7
3	4	12,0	13,3	1	3	3,3
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	139	100,0	30	143	100,0
Kategori	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		
Tang. Resp.	Item pernyataan X3.3			Item pertanyaan X3.4		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	22	110,0	73,3	26	130	86,7
4	6	24,0	20,0	4	16	13,3
3	2	6,0	6,7	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	140	100,0	30	146	100,0
Kategori	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (Y) sebagai berikut: Item 1 tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan sebanyak 23 orang (76,7%) memberikan jawaban selalu Relevan, 3 orang (10,0%) menjawab sering Relevan, dan 4 orang (13,3%) menjawab kadang-kadang relevan dengan standar kategori Sangat Tinggi

Item 2 tanggapan responden mengenai prosedur kualitas laporan keuangan dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menunjukkan sebanyak 24 orang (80,0%) memberikan jawaban selalu dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, 5 orang (16,7%) menjawab sering dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, dan 1 orang (3,3%) menjawab kadang-kadang dipahami oleh para pengguna laporan keuangan dengan standar kategori Sangat Tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai prosedur laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya menunjukkan sebanyak 22 orang (73,3%) memberikan jawaban selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, 6 orang (20,0%) menjawab sering dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan 2 orang (6,7%) menjawab kadang-kadang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan standar kategori Sangat Tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai prosedur laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu menunjukan sebanyak 26 orang (86,7%) memberikan jawaban selalu laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu, dan 4 orang (13,3%) menjawab sering laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu dengan standar kategori Sangat Tinggi.

Dengan demikian dari 4 item pernyataan pada sub variabel Kualitas Laporan Keuangan(Y) item pernyataan tertinggi adalah item pernyataan ke-3 dengan skor 146 (Sangat Tinggi) sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator Dapat Dibandingkan merupakan indicator yang mendominan dan paling tepat digunakan untuk mengukur sub variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

4.3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam analisi ini untuk mengetahui tingkat validitas dapat dilihat pada hasil olahan data. Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reabilitasnya terdapat 30 responden. Untuk uji validitas digunakan criteria nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan *valid* (Sugiyono 2012) dan untuk uji reliabilitas adalah *reliabel* jika nilai *Alpha Crombach* > 0.60 (Ghozali, 2015:46).

1) Uji Validitas dan Reabilitas Sistem Pencatatan (X1)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Sistem Pencatatan (X1) pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pencatatan (X1)

Sub variable	Indikator	Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Sistem Pencatatan	X1.1	0,634	4,338	2,048	Valid	0,696	> 0,60 : Reliabel
	X1.2	0,788	6,773	2,048	Valid		
	X1.3	0,733	5,702	2,048	Valid		
	X1.4	0,586	3,827	2,048	Valid		

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Sistem pencatatan (X1) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,696 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Struktur Organisasi adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

2) Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pengikhtisaran (X2)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Sistem Pengikhtisaran (X2) pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pengikhtisaran (X2)

Sub variable	Indikator	Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Sistem Pengikhtisaran	X2.1	0,705	5,260	2,048	Valid	0,629	> 0,60 : Reliabel
	X2.2	0,579	3,758	2,048	Valid		
	X2.3	0,678	4,881	2,048	Valid		

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,629 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Struktur Organisasi adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

3) Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pelaporan (X3)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Sistem Pelaporan (X3) pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pelaporan (X3)

Sub variable	Indikator	Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
		t_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Sistem Pelaporan	X3.1	0,563	3,605	2,048	Valid	0,604 Reliabel	> 0,60 : Reliabel
	X3.2	0,586	3,827	2,048	Valid		
	X3.3	0,732	5,685	2,048	Valid		
	X3.4	0,645	4,466	2,048	Valid		

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Sistem Pelaporan (X3) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,604 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Struktur Organisasi adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4) Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sub variable	Indikator	Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Kualitas Laporan keuangan	Y.1	0,621	4,192	2,048	Valid	0,638	> 0,60 : Reliabel
	Y.2	0,672	4,802	2,048	Valid		
	Y.3	0,739	5,804	2,048	Valid		
	Y.4	0,622	4,203	2,048	Valid		

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,638 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Struktur Organisasi adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan baik secara *simultan* maupun secara *parsial* (Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS, maka secara ringkas hasil pengujian hipotesis

dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Pengaruh antar Variabel	Koefisien Jalur	Sig	Alpha	Keputusan	Hipotesis
X1, X2, X3 Terhadap Y	0.562	0,000	0.05*	Signifikan	Diterima
X1 terhadap Y	0.386	0,009	0.05	Signifikan	Diterima
X2 terhadap Y	0.315	0.040	0.05	Signifikan	Diterima
X3 terhadap Y	0.353	0.018	0.05	Signifikan	Diterima

Keterangan: * berpengaruh apabila nilai sig < nilai Alpha 0,05

Sumber: Lampiran Olahan Data SPSS 21,2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa model diatas dapat dijelaskan oleh variasi Sub variabel Sistem Pencatatan (X1) secara Parsial Koefisien Jalur positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,386 (38,60%) dengan nilai signifikasi sebesar 0,009 (0,9%). Jika tarif uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig 0% masih lebih kecil dari nilai alpha 5% sehingga hipotesis persial dalam penelitian ini dapat diterima.

Sub variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) secara Parsial Koefisien Jalur positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,315 (31,50%) dengan nilai signifikasi sebesar 0,040 (4,00%). Jika tariff uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig 4,00% masih lebih kecil dari nilai alpha 5% sehingga hipotesis persial dalam penelitian ini dapat diterima.

Sub variabel Sistem Pelaporan (X3) secara Parsial Koefisien Jalurpositif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,353 (35,30%) dengan nilai signifikasi sebesar 0,18 (1,80%). Jika tariff uji signifikan (alpha) yang digunakan sebesar 5% maka nilai sig 1,80% masih lebih kecil dari nilai alpha 5% sehingga hipotesis persial dalam penelitian ini dapat diterima.

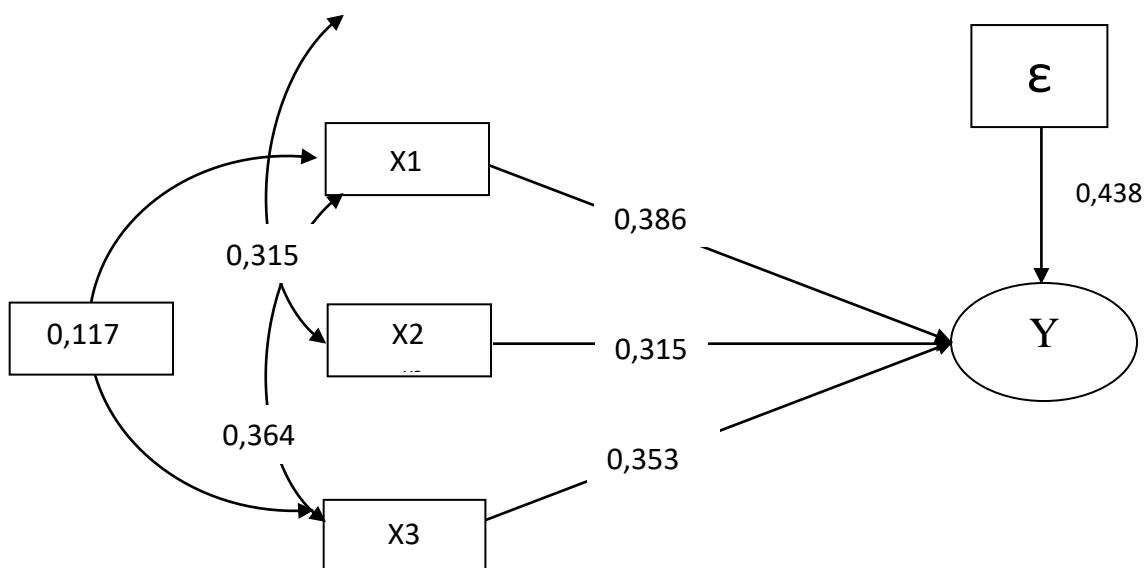
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi Sistem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), Sistem Pelaporan (X3), secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat diterima.

Hipotesis kedua Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi Sistem Pencatatan (X1), secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat diterima. Hipotesis ketiga sub variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat diterima. Dan Hipotesis keempat Sistem Pelaporan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat diterima.

4.4.1. Analisis Data Statistik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang terdiri dari Sistem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), Sistem

Pelaporan (X3), secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Data penelitian ini diolah digunakan dengan menggunakan program SPSS 21 dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan dengan struktur analisis jalur (*Path Analysis*) sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Analisis Jalur (Path Analysis)

Berdasarkan gambar hasil analisis di atas maka dapat disusun model persamaan jalur sebagai berikut :

$$\text{Persamaan jalur : } Y = 0,386X_1 + 0,315X_2 + 0,353X_3 + 0,438\epsilon$$

$$\text{Dengan } R^2 = 0,562$$

Berdasarkan structural persamaan jalur tersebut, maka secara sistematis pengaruh variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah baik

secara *simultan* maupun secara *Parsial* terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Dekomposisi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	Koef. Beta	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung			Pengaruh tidak Langsung	Total Pengaruh
			X1	X2	X3		
X1	0,386	0,149		0,038	0,016	0,054	0,203
X2	0,315	0,099	0,038		0,040	0,079	0,178
X3	0,353	0,125	0,016	0,040		0,056	0,181
Total Pengaruh X1,X2,X3 Terhadap Y							0,562
Variabel Epsilon							0,438

Sumber : Lampiran Olahan Data SPSS 21, 2021

Berdasarkan structural persamaan jalur diatas dapat dijelaskan hubungan antara setiap variabel sebagai berikut :

1. Sub variabel Sistem Pencatatan (X1) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sebesar 20,30% yang terdiri dari pengaruh langsung 14,9% dan tidak langsung sebesar 5,4%. Nilai tersebut bermakna jika Sistem Pencatatan (X1) lebih ditingkatkan dan diefektifkan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 20,30%.
2. Sub variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 17,80% yang terdiri dari pengaruh langsung 9,9% dan tidak langsung sebesar 7,9% . Nilai tersebut bermakna jika Sistem Pengikhtisaran (X2) Lebih ditingkatkan dan

diefektifkan, maka variabel Kualitas laporan Keuangan akan meningkat sebesar 17,80%.

3. Sub variabel Sistem Pelaporan (X3) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 18,10% yang terdiri dari pengaruh langsung 12,5% dan pengaruh tidak langsung sebesar 5,6%. Nilai tersebut bermakna jika Sistem Pelaporan (X3) Lebih ditingkatkan dan diefektifkan, maka variabel Kualitas laporan Keuangan akan meningkat sebesar 18,10%.
4. Nilai R2 sebesar 56,20% yang terdiri dari nilai Sub variabel Sistem Pencatatan (X1) 20,30%, Sub Variabel Sistem Pengikhtisaran (X2) 17,80%, dan sub Variabel Sistem Pelaporan (X3) 18,10% . Hasil ini menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel independent Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap variabel dependent Kualitas Laporan Keuangan secara simultan, sedangkan sisanya sebesar 43,80% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis statistika dengan menggunakan alat bantu computer program SPSS 21 dengan Microsoft Office Excel, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang terdiri dari Sistem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), Sistem Pelaporan (X3), secara *simultan* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukan bahwa konstribusi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Terdiri dari Sisstem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,562 (56,20%), yang berarti terdapat variael luar yang tidak dapat dijelaskan dalam model variabel luar yang turut mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,438 (43,80%). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat berpengaruh, maka dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone olango tidak dapat memproses transaksinya secara jelas dan teliti. Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango mungkin tidak akan memperoleh informasi yang

relevan dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntansi Keuangan juga didasarkan oleh peraturan Pemerintah (PP) Nomor:24 tahun 2005, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan, oprasional badan layanan umum serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipengaruhi dengan baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual,yakni berdasarkan pengakuan munculnya hakdan kewajiban,bukan berdasarkan pada aruskan semata.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Djakaria (2018) dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah Studi pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Gorontalo Utara, Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia juga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Bata Ilyas (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sarana Prasarana

terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sarana Prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

Demikian pula hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riedy Riandani (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Limapuluh Kota, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hal ini berhubungan dengan Konsep yang dikemukakan oleh Rosdiani (2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur.

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan semakin meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Darah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolangomaka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan.semakin baik kualitas laporan keuangan semakin tepat pula keputusan yang diambil.

2. Sistem Pencatatan (X1) secara *parsial* berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Hasil pengujian menunjukan bahwa Sistem Pencatatan (X1) secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,203 (20,30%), maka hipotesis dalam penelitian dapat diterima. Hasil ini menjukan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel Sistem Pencatatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Artinya jika penilaian terhadap Sistem Pencatatan ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan sebesar 20,30%. Besar pengaruh sub variabel Sistem Pencatatan terungkap berdasarkan hasil sebaran kuesioner ke sejumlah responden pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil hipotesis data statistik menujukan Sistem Pengikhtisaran memberikan konstribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,2015) menjelaskan bahwa sistem pencatatan penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Pencatatan memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Pencatatan juga untuk menungkatkan koordinasi dan komunikasi. Pencatatan bertujuan memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial dimasa yang akan datang dan akan mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran.

Peranan dalam pencatatan pada suatu badan layanan umum daerah merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi pencatatan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Pencatatan dilakukan hanya jika tersedia informasi akuntansi pertanggung jawaban yang mengukur sebagai sumber ekonomi yang disediakan bagi tiap manajer yang bertanggung jawab dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam tahun anggaran. Adapun manfaat Sistem Pencatatan dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotifasi pegawai/karyawan karena mempunyai tujuan/sasaran yang akan dicapai dengan menimbulkan rasa tanggungjawab pegawai,menghindari pemorosan dan pembayaran yangtidak perlu, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, dan segala kegiatan dapat taerarah pada pencapaian tujuan bersama.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arya Saputra (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah studi pada kabupaten Jambaran hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Demikian Pula hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriasi Pujanira (2017) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah DIY, Penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2019) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Motifasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi pada SKPD Kabupaten Musi Rawas Sumatra Selatan, Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sedangkan Motifasi Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hal ini berhubungan dengan Konsep yang dikemukakan oleh Mulyani (2015) motifasi kerja dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena berpengaruh terhadap output pertanggungjawaban suatu hal, baik dilihat dari segi yang berwujud maupun tidak berwujud.

Dengan demikian hasil pengujian ini mengandung bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa sistem pencatatan yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik.

3. Sistem Pengikhtisaran (X2) secara *parsial* berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengikhtisaran (X2) secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas alporan keuangan (Y) sebesar 0,178 (17,80%), maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel Sistem Pengikhtisaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya bahwa jika penilaian terhadap Sistem Pengikhtisaraan ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan sebesar 17,80%. Besar pengaruh sub variabel Sistem Pengikhtisaraan terungkap berdasarkan hasil sebaran kuesioner ke sejumlah responden pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil hipotesis data statistik menunjukkan Sistem Pengikhtisaran memberikan kontribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Badan pendidikan dan pelatihan keuangan (BPKK-KEMENKEU,2015) menjelaskan bahwa pengikhtisaran BLUD terdapat mekanisme penyampaian dana oleh bendahara penerimaan kepada bendahara pengeluaran. Berkenaan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLUD, dokumen sumber dan prosedur kerja terkait pengikhtisaran uang oleh bendahara ditetapkan oleh BULD,kecuali telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengendalian internal,

secara berkala harus dilakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal BLUD.Dalam rangka pertanggung jawaban atas pengelolaan uang, pengelolaan keuangan BLUD dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengikhtisaran BILD Badan keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango diterapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan serta pengendalian interen yang baik atas transaksi-transaksi keuangan maupun non keuangan badan keuangan pendapatan daerah kabupaten Bone Bolango.Pengikhtisaran dilakukan agar setiap langkah-langkah kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Pengikhtisaran BULD Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baik tentu harus didasarkan pada kriteria utama diatas. Pengendalian interen dan ketaatan pada regresi. Pengendalian interen dibutuhkan agar setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat diyakini telah dilakukan dengan benar dan aman.Sedangkan ketaatan pada regulasi menjamin bahwa prosedur yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan UU maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Disinilah kreatifitas Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango diuji, dengan sumber daya manusia terbatas tetapi harus mampu mengelolah transaksi keuangan yang mampu mengatasi asetnya sekaligus mengamankan asetnya sekaligus mengamankan pelaksanaannya dari jeratan hukum regresi. Sedikitnya pasal tentang pengikhtisaran dalam

permendagri No. 61 tahun 2007 harus dipahami sebagai sebuah peluang bagi Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk membuat pengikhtisaran yang efisien sekaligus nyaman diimplementasikan oleh pegawainya. (BPPK-KEMENKEU,2015)

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2017) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Interen pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi pada Empiris pada DPPKAD Subang, hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara persial sistem akuntansi keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Interen pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah

Demikian pula hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlyn C.T. Kulumata (2016) dengan judul Pengaruh Review Laporan Keuangan Dan sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Review Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Ali Fikri (2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Audit internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintahan penerapan standar akuntansi pemrintah dan peran internal

audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini berhubungan dengan konsep yang dikemukakan oleh Angraini (2016) dengan adanya sistem pengendalian interen yang efektif dan baik maka akan meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan untuk organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi mereka.

Dengan demikian hasil ini mendukung pengertian bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa Sistem Pengikhtisaran yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik.

4. Sistem Pelaporan (X3) secara *persial* berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pelaporan (X3) secara *persial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas alporan keuangan (Y) sebesar 0,181 (18,10%), maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif sub variabel Sistem Pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya bahwa jika penilaian terhadap Sistem Pelaporan ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan sebesar 18,10%. Besar pengaruh sub variabel Sistem Pelaporan terungkap berdasarkan hasil sebaran kuesioner ke sejumlah responden pada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Dari

hasil hipotesis data statistik menujukan Sistem Pelaporan memberikan konstribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BLUD menyelenggarakan Sistem Pelaporan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Kebijakan Akuntansi BULD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan serta biaya. Hal diatas tercantum dalam pemendagri No. 6 Tahun 2007 pasal 115 hingga pasal 117. Secara operasional manajemen keuangan di Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus dapat menghasilkan data, informasi dan petunjuk untuk membantu kepala daerah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan agar mutu pelayanan dapat dipertahankan/ ditingkatkat pada tingkat pembayaan yang wajar. Menurut Bastian (2018) Akuntansi ialah sistem yang merupakan salah satu pokok kegiatan dalam manajemen keuangan terdiri dari kegiatan mencatat,mengklasifikasikan dan menyimpulkan semua transaksi dan kejadian-kejadian dalam suatu organisasi yang menyangkut keuangan, sehingga di dapatkan suatu data atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam pedoman akuntansi BULD Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ini mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau

peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar agar posisi keuangan (Aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP,2015).

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andini (2018) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meta Dewi Rianisanti (2017) dengan judul Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Interen sebagai Variabel Moderating, Studi pada SKPD kabupaten Klaten menunjukan hasil bahwa Sistem pengendalian intern tidak Memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian interen dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Demikian pula penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wikan Istikha (2018) yang berjudul Analisis Faktor

Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Semarang, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah kota semarang

Hal ini berhubungan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sutabri (2012:20) Sistem suatu organisasi memerlukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Dengan demikian hasil ini mengandung pengertian bahwa Sistem Akuntansi keuangan daerah berupa Sistem Pelaporan yang digunakan dalam lingkungan Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis statistic pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Sistem Pencatatan (X1), Sistem Pengikhtisaran (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,562 (56,20%) dan terdapat variabel luar yang tidak diteliti namun turut berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,438 (43,80%). Hasil ini mengidentifikasi bahwa model yang diajukan pada penelitian ini dapat diterima dan dapat dijelaskan secara bersama” oleh variasi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima(terbukti).
2. Sub variabel Sistem Pencatatan, secara *parsial* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,203 (20,30%), yang artinya Sistem Pencatatan memberikan konstribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem pencatatan memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Agar bermanfaat, pencatatan dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotifikasi pegawai karena ada tujuan/sasaran yang akan dicapai dengan

menimbulkan rasa tanggungjawab pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima (terbukti).

3. Sub variabel Sistem Pengikhtisaran, secara *parsial* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,178 (17,80%), yang artinya Sistem Pengikhtisaran memberikan konstribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengelolan keuangan BULD yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan,perlu diatur ketentuan mengenai pengikhtisaran keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima (terbukti)
4. Sub variabel Sistem Pelaporan, secara *parsial* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,181 (18,10%), yang artinya Sistem Pengikhtisaran memberikan konstribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kebijakan sistem pelaporan harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima(terbukti).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan melaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner kemungkinan tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan perbedaan pemikiran, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
2. Keterlambatan mendapatkan izin penelitian karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan pada bagian Sub variabel Sistem Pelaporan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimana dari hasil jawaban responden menyatakan bahwa sub variabel Sistem pelaporan sangat rendah. Agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan keuangan, maka harus mendapatkan pegawai sesuai dengan keahlian dibidang ilmunya terutama bidang akuntansi dan keuangan pada bagian yang mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya hendaknya agar lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel bebas

yang berkemungkinan berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan, misalnya variabel pengalaman kerja dan Sistem pertanggungjawaban (Permendagri No.61 tahun 2007

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007) Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Selemba Empat
- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta: Grafindo
- Arikunto,2002.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rikena Cipta
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Cavalluzzo, K. S. dan C. D. ittner. 2004. Implementing Performance Measurement Inovations: Evidence From Government. Accounting, organizations and Society
- Darise, Nurlan, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), PT Indeks, Jakarta
- Erlina, Rasdianto, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual,Penerbit Brama Ardian
- Harun Al-Rasyid dalam Riduwan dan engkos kuncoro (2007)
- <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/>
- <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=329143>
- <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/jak/article/view/547>
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Masrun yang dikutip Sugiyono (2006) Pengujian Instrumen Penelitian
- Mardiasmo, 2002 . Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009 . Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Mulyana Deddy, M.A., Ph.D. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rosda

- Nordiawan, Deddy.2006. AKuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang penngelolaan keuangan daerah
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas
- Riduwan,2015. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Republic Indonesia 2005. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas
- Soobaroyen teeroven. (2006). “ Management Control System and Dysfunctional Behavior: an Empirical investigation”. Accounting Behaviour.
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2008. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: STIM

LAMPIRAN

1. Kuisioner

Deskripsi Responden

Jenis kelamin : perempuan/ laki-laki

Umur : Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Pendidikan terakhir :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan tanda (X)

PERTANYAAN

- **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pencatatan)**

1. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
2. Kegiatan pengukuran dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
3. Kegiatan pengidentifikasi dilakukan dalam bentuk bukti transaksi pencatatan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan

- e. Sangat tidak pernah
4. Kegiatan pemindahan bukuan diposting ke buku harian atau jurnal
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah

• **Pengikhtisaran**

- 1. penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldoanya Selama periode tertentu, diambil dari buku besar
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
- 2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian dengan menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
- 3. Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah

- **Pelaporan**

1. Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entias harus menyusun laporan keuangan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
2. Kepala daerah menyampaikan rencana perda kepada DPRD
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
3. Rencana perda disetujui oleh kepala Daerah dan DPRD
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
4. Kepala Daerah melaporkan keseluruhan laporan keuangan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah

- **Kualitas Laporan Keuangan**

1. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sudah relevan
 - a. Selalu
 - b. Sering

- c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
2. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
 3. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah
 4. Laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak dilakukan
 - e. Sangat tidak pernah

2. Hasil Tabulasi Data

Sub Variabel Sistem Pencatatan (X1)

Resp.	Item Pernyataan				JUMLAH
	1	2	3	4	
1	4	5	5	5	19
2	5	4	4	5	18
3	5	5	5	5	20
4	4	5	5	4	18
5	5	4	4	4	17
6	5	5	5	5	20
7	4	5	5	5	19
8	5	5	5	5	20
9	4	5	5	5	19
10	4	4	4	4	16
11	5	5	5	5	20
12	5	4	5	3	17
13	5	5	5	5	20
14	4	4	5	4	17
15	5	5	5	4	19
16	5	5	5	5	20
17	3	4	4	5	16
18	5	5	5	4	19
19	5	5	4	5	19
20	5	5	5	5	20
21	4	5	5	5	19
22	5	5	4	4	18
23	4	4	4	4	16
24	2	4	3	4	13
25	3	5	5	5	18
26	5	4	4	4	17
27	5	4	4	4	17
28	4	5	4	5	18
29	4	4	5	4	17
30	5	4	4	5	18

Succesive Detail

C o 1	Categor y	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
1,000	2,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000
	3,000	2,000	0,067	0,100	0,175	-1,282	1,708
	4,000	10,000	0,333	0,433	0,393	-0,168	2,573
	5,000	17,000	0,567	1,000	0,000		3,921
2,000	4,000	12,000	0,400	0,400	0,386	-0,253	1,000
	5,000	18,000	0,600	1,000	0,000		2,610
3,000	3,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000

	4,000	11,000	0,367	0,400	0,386	-0,253	2,376
	5,000	18,000	0,600	1,000	0,000		3,871
4,000	3,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000
	4,000	12,000	0,400	0,433	0,393	-0,168	2,429
	5,000	17,000	0,567	1,000	0,000		3,921

Successive Interval

4	5	5	5	Total
2,573	2,610	3,871	3,921	12,975
3,921	1,000	2,376	3,921	11,218
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
2,573	2,610	3,871	2,429	11,483
3,921	1,000	2,376	2,429	9,726
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
2,573	2,610	3,871	3,921	12,975
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
2,573	2,610	3,871	3,921	12,975
2,573	1,000	2,376	2,429	8,378
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
3,921	1,000	3,871	1,000	9,792
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
2,573	1,000	3,871	2,429	9,873
3,921	2,610	3,871	2,429	12,831
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
1,708	1,000	2,376	3,921	9,005
3,921	2,610	3,871	2,429	12,831
3,921	2,610	2,376	3,921	12,828
3,921	2,610	3,871	3,921	14,323
2,573	2,610	3,871	3,921	12,975
3,921	2,610	2,376	2,429	11,336
2,573	1,000	2,376	2,429	8,378
1,000	1,000	1,000	2,429	5,429
1,708	2,610	3,871	3,921	12,110
3,921	1,000	2,376	2,429	9,726
3,921	1,000	2,376	2,429	9,726
2,573	2,610	2,376	3,921	11,480
2,573	1,000	3,871	2,429	9,873
3,921	1,000	2,376	3,921	11,218

Sub Variabel Sistem Pengikhtisaran (X2)

Resp.	Item Pernyataan			JUMLAH
	1	2	3	
1	4	5	5	14
2	5	5	5	15
3	5	4	5	14
4	5	5	5	15
5	5	4	4	13
6	5	4	5	14
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	5	4	5	14
10	4	4	4	12
11	5	5	5	15
12	5	4	5	14
13	5	5	5	15
14	4	5	5	14
15	5	4	5	14
16	5	5	5	15
17	4	5	5	14
18	4	5	4	13
19	5	4	5	14
20	5	5	5	15
21	5	5	3	13
22	4	4	4	12
23	3	4	5	12
24	5	5	5	15
25	5	4	5	14
26	4	5	4	13
27	5	4	5	14
28	4	4	3	11
29	4	3	5	12
30	5	4	5	14

Succesive Detail

Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
1,000	3,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000
	4,000	9,000	0,300	0,333	0,364	-0,431	2,262
	5,000	20,000	0,667	1,000	0,000		3,772
2,000	3,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000
	4,000	14,000	0,467	0,500	0,399	0,000	2,531
	5,000	15,000	0,500	1,000	0,000		4,025
3,000	3,000	2,000	0,067	0,067	0,129	-1,501	1,000
	4,000	5,000	0,167	0,233	0,306	-0,728	1,879
	5,000	23,000	0,767	1,000	0,000		3,339

4	5	5	Total
2,262	4,025	3,339	9,626
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	2,531	3,339	9,642
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	2,531	1,879	8,182
3,772	2,531	3,339	9,642
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	2,531	3,339	9,642
2,262	2,531	1,879	6,672
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	2,531	3,339	9,642
3,772	4,025	3,339	11,136
2,262	4,025	3,339	9,626
3,772	2,531	3,339	9,642
3,772	4,025	3,339	11,136
2,262	4,025	3,339	9,626
2,262	4,025	1,879	8,166
3,772	2,531	3,339	9,642
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	4,025	1,000	8,797
2,262	2,531	1,879	6,672
1,000	2,531	3,339	6,870
3,772	4,025	3,339	11,136
3,772	2,531	3,339	9,642
2,262	4,025	1,879	8,166
3,772	2,531	3,339	9,642
2,262	2,531	1,000	5,794
2,262	1,000	3,339	6,601
3,772	2,531	3,339	9,642

Sub Variabel Sistem Pelaporan (X3)

Resp.	Item Pernyataan				JUMLAH
	1	2	3	4	
1	4	4	3	5	16
2	5	5	4	5	19
3	5	4	4	5	18
4	5	4	3	5	17
5	5	4	3	5	17
6	5	4	4	5	18
7	5	4	4	5	18
8	5	4	4	5	18
9	4	4	3	3	14
10	4	4	4	3	15
11	5	4	3	5	17
12	5	5	3	5	18
13	5	4	3	5	17
14	5	5	5	5	20
15	5	4	2	4	15
16	5	5	5	5	20
17	5	4	4	4	17
18	4	5	5	5	19
19	5	4	4	5	18
20	5	4	4	5	18
21	4	4	4	3	15
22	5	5	5	5	20
23	5	3	3	5	16
24	5	4	4	5	18
25	3	5	2	5	15
26	3	4	4	5	16
27	5	4	4	5	18
28	5	3	3	5	16
29	4	3	3	4	14
30	5	4	4	5	18

Succesive Detail

Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
1,000	3,000	2,000	0,067	0,067	0,129	-1,501	1,000
	4,000	6,000	0,200	0,267	0,329	-0,623	1,943
	5,000	22,000	0,733	1,000	0,000		3,388
2,000	3,000	3,000	0,100	0,100	0,175	-1,282	1,000
	4,000	20,000	0,667	0,767	0,306	0,728	2,559
	5,000	7,000	0,233	1,000	0,000		4,067
3,000	2,000	2,000	0,067	0,067	0,129	-1,501	1,000
	3,000	10,000	0,333	0,400	0,386	-0,253	2,168
	4,000	14,000	0,467	0,867	0,215	1,111	3,306
4,000	5,000	4,000	0,133	1,000	0,000		4,554
	3,000	3,000	0,100	0,100	0,175	-1,282	1,000
	4,000	3,000	0,100	0,200	0,280	-0,842	1,710
	5,000	24,000	0,800	1,000	0,000		3,105

4	4	3	5	Total
1,943	2,559	2,168	3,105	9,776
3,388	4,067	3,306	3,105	13,866
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
3,388	2,559	2,168	3,105	11,220
3,388	2,559	2,168	3,105	11,220
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
1,943	2,559	2,168	1,000	7,671
1,943	2,559	3,306	1,000	8,808
3,388	2,559	2,168	3,105	11,220
3,388	4,067	2,168	3,105	12,728
3,388	2,559	2,168	3,105	11,220
3,388	4,067	4,554	3,105	15,114
3,388	2,559	1,000	1,710	8,657
3,388	4,067	4,554	3,105	15,114
3,388	2,559	3,306	1,710	10,963
1,943	4,067	4,554	3,105	13,669
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
1,943	2,559	3,306	1,000	8,808
3,388	4,067	4,554	3,105	15,114
3,388	1,000	2,168	3,105	9,661
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
1,000	4,067	1,000	3,105	9,172
1,000	2,559	3,306	3,105	9,970
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358
3,388	1,000	2,168	3,105	9,661
1,943	1,000	2,168	1,710	6,822
3,388	2,559	3,306	3,105	12,358

Lampiran 2. Data Ordinal

Sub Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Resp.	Item Pernyataan				JUMLAH
	1	2	3	4	
1	5	5	4	5	19
2	5	5	5	5	20
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	5	4	5	5	19
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	4	5	19
10	4	4	4	5	17
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	4	19
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	3	5	5	5	18
18	5	5	4	5	19
19	5	5	5	5	20
20	5	5	5	5	20
21	5	5	4	5	19
22	5	4	5	5	19
23	4	4	5	4	17
24	3	5	5	5	18
25	3	5	3	5	16
26	5	2	3	4	14
27	5	5	5	5	20
28	4	4	5	5	18
29	3	5	4	4	16
30	5	5	5	5	20

Succesive Detail

Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
1,000	3,000	4,000	0,133	0,133	0,215	-1,111	1,000
	4,000	3,000	0,100	0,233	0,306	-0,728	1,706
	5,000	23,000	0,767	1,000	0,000		3,014
2,000	2,000	1,000	0,033	0,033	0,074	-1,834	1,000
	4,000	5,000	0,167	0,200	0,280	-0,842	1,993
	5,000	24,000	0,800	1,000	0,000		3,577
3,000	3,000	2,000	0,067	0,067	0,129	-1,501	1,000
	4,000	6,000	0,200	0,267	0,329	-0,623	1,943
	5,000	22,000	0,733	1,000	0,000		3,388
4,000	4,000	4,000	0,133	0,133	0,215	-1,111	1,000
	5,000	26,000	0,867	1,000	0,000		2,863

5	5	4	5	Total
3,014	3,577	1,943	2,863	11,397
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	1,993	3,388	2,863	11,257
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	1,943	2,863	11,397
1,706	1,993	1,943	2,863	8,505
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	1,000	10,978
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
1,000	3,577	3,388	2,863	10,828
3,014	3,577	1,943	2,863	11,397
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
3,014	3,577	1,943	2,863	11,397
3,014	1,993	3,388	2,863	11,257
1,706	1,993	3,388	1,000	8,087
1,000	3,577	3,388	2,863	10,828
1,000	3,577	1,000	2,863	8,440
3,014	1,000	1,000	1,000	6,014
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841
1,706	1,993	3,388	2,863	9,950
1,000	3,577	1,943	1,000	7,520
3,014	3,577	3,388	2,863	12,841

Rekapan Data Successive Interval

No	X1	X2	X3	Y
1	12,975	9,626	9,776	11,397
2	11,218	11,136	13,866	12,841
3	14,323	9,642	12,358	12,841
4	11,483	11,136	11,220	12,841
5	9,726	8,182	11,220	11,257
6	14,323	9,642	12,358	12,841
7	12,975	11,136	12,358	12,841
8	14,323	11,136	12,358	12,841
9	12,975	9,642	7,671	11,397
10	8,378	6,672	8,808	8,505
11	14,323	11,136	11,220	12,841
12	9,792	9,642	12,728	12,841
13	14,323	11,136	11,220	12,841
14	9,873	9,626	15,114	10,978
15	12,831	9,642	8,657	12,841
16	14,323	11,136	15,114	12,841
17	9,005	9,626	10,963	10,828
18	12,831	8,166	13,669	11,397
19	12,828	9,642	12,358	12,841
20	14,323	11,136	12,358	12,841
21	12,975	8,797	8,808	11,397
22	11,336	6,672	15,114	11,257
23	8,378	6,870	9,661	8,087
24	5,429	11,136	12,358	10,828
25	12,110	9,642	9,172	8,440
26	9,726	8,166	9,970	6,014
27	9,726	9,642	12,358	12,841
28	11,480	5,794	9,661	9,950
29	9,873	6,601	6,822	7,520
30	11,218	9,642	12,358	12,841

Frequencies

1.3.1 x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	17	56,7	56,7	56,7
4,00	10	33,3	33,3	90,0
Valid 3,00	2	6,7	6,7	96,7
2,00	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	18	60,0	60,0	60,0
Valid 4,00	12	40,0	40,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	18	60,0	60,0	60,0
Valid 4,00	11	36,7	36,7	96,7
3,00	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

x1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	17	56,7	56,7	56,7
Valid 4,00	12	40,0	40,0	96,7
3,00	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	20	66,7	66,7
	4,00	9	30,0	96,7
	3,00	1	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	15	50,0	50,0
	4,00	14	46,7	96,7
	3,00	1	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	23	76,7	76,7
	4,00	5	16,7	93,3
	3,00	2	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	22	73,3	73,3
	4,00	6	20,0	93,3
	3,00	2	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	7	23,3	23,3
	4,00	20	66,7	90,0
	3,00	3	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	4	13,3	13,3
	4,00	14	46,7	60,0
	3,00	10	33,3	93,3
	2,00	2	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0

x3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	24	80,0	80,0
	4,00	3	10,0	90,0
	3,00	3	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0

y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	23	76,7	76,7
	4,00	3	10,0	86,7
	3,00	4	13,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	24	80,0	80,0
	4,00	5	16,7	96,7
	2,00	1	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	22	73,3	73,3
	4,00	6	20,0	93,3
	3,00	2	6,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,00	26	86,7	86,7
	4,00	4	13,3	100,0
	Total	30	100,0	

Validitas dan Reliabilitas

		Correlations				
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1
	Pearson Correlation	1	,197	,285	,005	,634**
x1.1	Sig. (2-tailed)		,297	,127	,978	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,197	1	,584**	,533**	,788**
x1.2	Sig. (2-tailed)	,297		,001	,002	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,285	,584**	1	,205	,733**
x1.3	Sig. (2-tailed)	,127	,001		,276	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,005	,533**	,205	1	,586**
x1.4	Sig. (2-tailed)	,978	,002	,276		,001
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,634**	,788**	,733**	,586**	1
x1	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	
	N	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed).

1.3.2 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,696	,633	4

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2
	Pearson Correlation	1	,123	,281	,705**
x2.1	Sig.(2-tailed)		,517	,133	,000
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,123	1	,020	,579**
x2.2	Sig.(2-tailed)	,517		,915	,001
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,281	,020	1	,678**
x2.3	Sig.(2-tailed)	,133	,915		,000
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,705**	,579**	,678**	1
x2	Sig.(2-tailed)	,000	,001	,000	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1.3.1 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,629	,631	3

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3
	Pearson Correlation	1	-,066	,189	,349	,563**
x3.1	Sig. (2-tailed)		,728	,317	,059	,001
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	-,066	1	,401*	,204	,586**
x3.2	Sig. (2-tailed)	,728		,028	,280	,001
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,189	,401*	1	,132	,732**
x3.3	Sig. (2-tailed)	,317	,028		,487	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,349	,204	,132	1	,645**
x3.4	Sig. (2-tailed)	,059	,280	,487		,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,563**	,586**	,732**	,645**	1
x3	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1.3.2 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,604	,602	4

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y
	Pearson Correlation	1	,005	,264	,213	,621**
y1	Sig. (2-tailed)		,979	,159	,259	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,005	1	,385*	,457*	,672**
y2	Sig. (2-tailed)	,979		,036	,011	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,264	,385*	1	,274	,739**
y3	Sig. (2-tailed)	,159	,036		,143	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,213	,457*	,274	1	,622**
y4	Sig. (2-tailed)	,259	,011	,143		,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,621**	,672**	,739**	,622**	1
Y	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1.3.3 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,638	,692	4

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,750 ^a	,562	,511	1,07596	,562	11,114	3	26	,000

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

1.3.4 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38,600	3	12,867	11,114
	Residual	30,100	26	1,158	
	Total	68,700	29		

a. Dependent Variable:y

b. Predictors: (Constant), x3, x1,x2

1.3.5 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,832	3,140	,265	,793
	x1	,363	,129	,386	2,822
	x2	,431	,199	,315	2,161
	x3	,322	,127	,353	2,531

a. Dependent Variable: y

Correlations

1.3.1 Correlations

	x1	x2	x3	y	
	Pearson Correlation	1	,315	,117	,526**
x1	Sig. (2-tailed)		,090	,538	,003
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,315	1	,364*	,565**
x2	Sig. (2-tailed)	,090		,048	,001
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,117	,364*	1	,512**
x3	Sig. (2-tailed)	,538	,048		,004
	N	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,526**	,565**	,512**	1
Y	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,004	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Perhitungan t-hitung

Rumus : _____

Item	R	r^2	n	$r\sqrt{n-2}$	$\sqrt{1-r^2}$	t-hitung	t-tabel	Ket
X1.1	0,634	0,402	30	3,355	0,773	4,338	2,048	valid
X1.2	0,788	0,621	30	4,170	0,616	6,773	2,048	valid
X1.3	0,733	0,537	30	3,879	0,680	5,702	2,048	valid
X1.4	0,586	0,343	30	3,101	0,810	3,827	2,048	valid

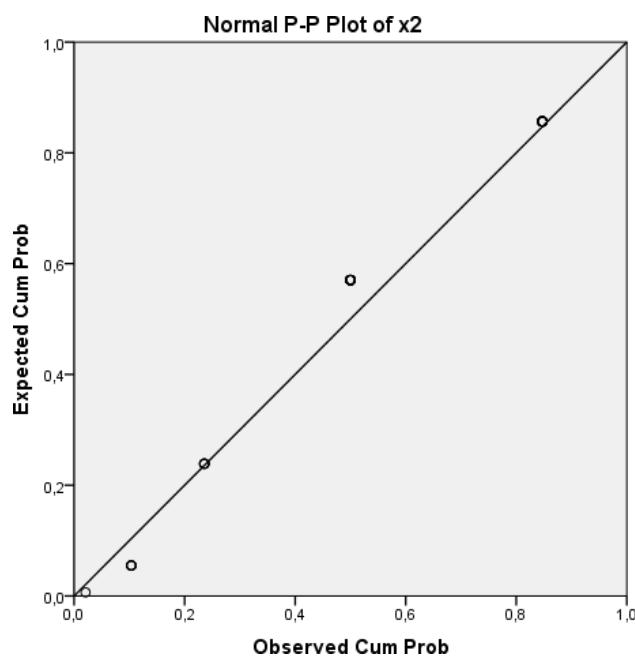
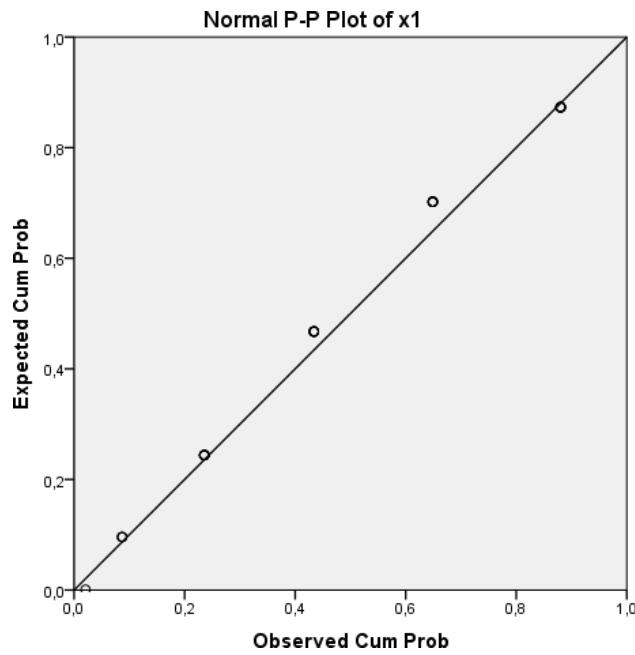
Item	R	r^2	n	$r\sqrt{n-2}$	$\sqrt{1-r^2}$	t-hitung	t-tabel	Ket
X2.1	0,705	0,497	30	3,731	0,709	5,260	2,048	valid
X2.2	0,579	0,335	30	3,064	0,815	3,758	2,048	valid
X2.3	0,678	0,460	30	3,588	0,735	4,881	2,048	valid

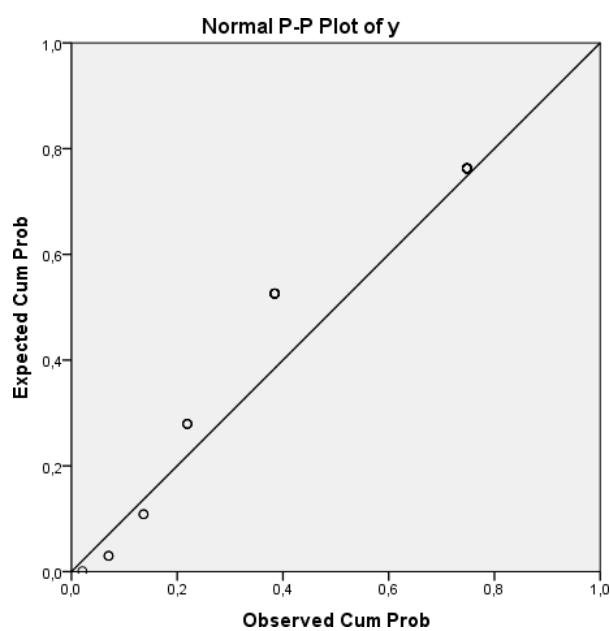
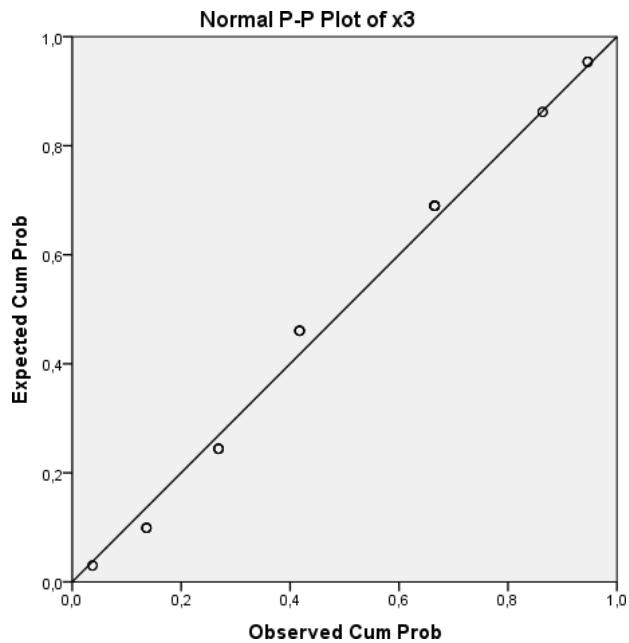
Item	R	r^2	n	$r\sqrt{n-2}$	$\sqrt{1-r^2}$	t-hitung	t-tabel	Ket
X3.1	0,563	0,317	30	2,979	0,826	3,605	2,048	valid
X3.2	0,586	0,343	30	3,101	0,810	3,827	2,048	valid
X3.3	0,732	0,536	30	3,873	0,681	5,685	2,048	valid
X3.4	0,645	0,416	30	3,413	0,764	4,466	2,048	valid

Item	R	r^2	n	$r\sqrt{n-2}$	$\sqrt{1-r^2}$	t-hitung	t-tabel	Ket
Y.1	0,621	0,386	30	3,286	0,784	4,192	2,048	valid
Y.2	0,672	0,452	30	3,556	0,741	4,802	2,048	valid
Y.3	0,739	0,546	30	3,910	0,674	5,804	2,048	valid
Y.4	0,622	0,387	30	3,291	0,783	4,203	2,048	valid

d.f.	TINGKAT SIGNIFIKANSI						
	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
dua sisi	10%	5 %	2,5%	1%	0,5%	0,1%	0,05%
satu sisi							
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	3,286	3,526
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	3,277	3,515

Scatter Plot





Histogram

